

## ABSTRAK

Strategi diplomasi publik Indonesia untuk menjamin hak pendidikan anak pekerja migran Indonesia di Sabah, Malaysia, mencakup pendirian sekolah Indonesia, pusat pembelajaran komunitas, program penempatan guru, dan bantuan repatriasi. Upaya ini bertujuan memajukan tujuan kemanusiaan, memperkuat legitimasi domestik, dan mempromosikan norma pendidikan inklusif dalam kerangka regional. Beroperasi dalam hubungan bilateral yang kompleks dengan Malaysia, strategi ini menyeimbangkan kepentingan nasional dan dinamika regional. Namun, kebijakan imigrasi yang ketat, prinsip non-interferensi regional, resistensi administratif, dan keterbatasan sumber daya domestik menjadi tantangan signifikan. Melalui analisis kualitatif, peran ganda Indonesia sebagai aktor independen yang merespons ekspektasi domestik dan kolaborator regional yang memajukan norma kolektif terlihat jelas. Rekomendasi mencakup revisi perjanjian bilateral, peningkatan alokasi sumber daya domestik, pembentukan koalisi regional, dan penguatan kapasitas diplomatik untuk memastikan akses pendidikan yang berkelanjutan bagi anak migran.

**Kata Kunci:** Diplomasi Publik, Peran Nasional, Pendidikan Migran, Hubungan Bilateral, Kerja Sama Regional, Kebijakan Kemanusiaan, Keterbatasan Sumber Daya

*Indonesia's public diplomacy strategies to ensure educational rights for children of Indonesian migrant workers in Sabah, Malaysia, utilize initiatives such as Indonesian schools, community learning centers, teacher deployment programs, and repatriation assistance. These efforts aim to advance humanitarian objectives, reinforce domestic legitimacy, and promote inclusive education norms within the regional framework. Operating within a complex bilateral relationship with Malaysia, these strategies balance national interests and regional dynamics. However, restrictive immigration policies, regional non-interference principles, administrative resistance, and limited domestic resources pose significant challenges. Through qualitative analysis, Indonesia's dual role as an independent actor addressing domestic expectations and a regional collaborator fostering collective norms is evident. Recommendations include revising bilateral agreements, increasing domestic resource allocation, forming regional coalitions, and enhancing diplomatic capacity to ensure sustainable educational access for migrant children.*

**Keywords:** *Public Diplomacy, National Role, Migrant Education, Bilateral Relations, Regional Cooperation, Humanitarian Policy, Resource Constraints*